

**Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan  
Komitmen Organisasi Sebagai  
Variabel Moderasi**

**Barbara Gunawan**

barbaragunawan@yahoo.co.id

**Septi Dwi Sabarini**

septidwisabarini@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta, 55183,

Telp 0274 387656, Indonesia.

***Abstract***

*This study aims to examine effect of applying government accounting standard, human resource competencies, government internal control system and the use of information technology on the quality of report on local government finances with organization commitment as a moderating variable in Bantul Regency. Sample in this study is 77 respondents with a purposive sampling method. The analytical tool used is the Moderator Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the application of government accounting standards, human resource competencies, government internal control system and the use of information technology have a positive and significant effect on the quality of report on local government finances with organization commitment to strengthen the relationship between the quality of report on local government finances.*

*Keyword: Government Accounting Standard, Human Resource Competencies, Government Internal Control System, Information Technology, Local Government Financial Reports, Organizational Commitment*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi di Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 77 responden dengan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan *Moderator Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi memperkuat pengaruh hubungan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Teknologi Informasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi

**1. Pendahuluan**

Seiring meningkatnya tuntutan dari masyarakat mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), semakin mendorong organisasi sektor publik di Indonesia pada tingkat pusat maupun daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi itu sendiri lebih kepada prinsip untuk bebas mengakses atau memperoleh informasi penyelenggaraan

pemerintah serta hasil yang dicapainya. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan organisasi kepada publik secara periodik. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah berjalan baik. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak enam tahun yang lalu, Kabupaten Bantul kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sekda Bantul Riyantono mengatakan pencapaian WTP tahun ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Bantul sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditentukan<sup>1</sup>. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara<sup>2</sup>. Selain itu, melalui surat hasil pemeriksaan BPK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Bupati Bantul atas kelemahan diatas. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, maka peneliti perlu mengkaji secara mendalam pada kabupaten Bantul. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan sistem informasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan.

Wewenang pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisi bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah yang telah disusun pada saatnya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangan yang ada. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Yuliani dan Agustini, 2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan standar akuntansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah agar laporan keuangan lebih akuntabel dan berkualitas.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga ditentukan dari pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai. Sistem pengendalian intern mempunyai peran dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kinerja.

Laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bagi pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan. Karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat peraturan. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas tidak dapat lepas dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi pemerintah

---

<sup>1</sup> Artikel diterbitkan oleh KRJogja.com dengan judul “Jalankan Pemerintahan Transparan Bantul Kembali Raih Opini WTP” oleh Agus Sigit (2018).

<sup>2</sup> Surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang disampaikan Kepada Bupati Bantul.

(Nurillah dan Muid, 2014). Menurut Boutler *et al.*, (1999) dalam Indriasih (2014) mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik di bidang pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Masih terbatasnya aparatur di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah (Anggriawan dan Yudianto, 2018). Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan jauh dari kata baik dan benar serta laporan keuangan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah daerah tersebut kurang berkualitas. Sejalan dengan penelitian Suarmika dan Suputra (2016) yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan.

Hal lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan serta mendistribusikan informasi keuangan ke layanan publik secara cepat. Penelitian yang dilakukan Nurlis dan Yadiati (2017) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan yang signifikan.

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel (Lie, 2009). Sehingga penambahan variabel moderasi berupa variabel komitmen organisasi dalam konteks pemerintahan daerah akan menjadikan aparatur pemerintah dengan komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang mereka miliki untuk menyusun laporan keuangan agar relatif lebih sesuai dengan standar yang digunakan. Selain itu, dalam penelitian Anggriawan dan Yudianto (2018) menyatakan komitmen organisasi dapat menjadi alat psikologis dalam menjalankan organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Menurut Mowday *et al.*, (1979), komitmen yang kuat dalam organisasi akan mampu menciptakan kepercayaan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Adanya komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, dengan komitmen organisasi ini akan menjaga kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan di bawah Standar Akuntansi Pemerintah.

## **2. Kajian Pustaka**

### **Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)**

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) adalah teori tentang suatu kondisi dimana para manajemen tidak terfokus oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih berorientasi kepada tujuan organisasi. Sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan suatu instansi/lembaga (Donaldson dan Davis, 1991). Dalam teori ini manager sebagai *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik selaku *principal*. Sebagai *steward*, pemerintah perlu membuat pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya sebagai bentuk akuntabilitas publik salah satunya dengan menerbitkan laporan keuangan. Nosihana dan Yaya (2016) mengatakan bahwa pemerintah yang menjalankan peran sebagai salah satu pihak yang memiliki pengetahuan tentang informasi yang lebih banyak, sehingga diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Dimana informasi tersebut berupa laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Firdaus *et al.*, 2015). Selain itu pemerintah daerah juga wajib memperhatikan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat (Setyowati, Isthika, dan Pratiwi, 2016).

## **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Syarifudin, 2014). Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

## **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah dengan kualitas laporan keuangan. Karena keberadaan sumber daya manusia sangat berperan dalam penyusunan laporan keuangan. Jika sumber daya manusia yang terkandung dalam pemerintah kompeten di bidangnya dan mampu melakukan tugasnya dengan baik, itu akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia yang berkompeten akan memberikan manfaat terhadap pembuatan laporan keuangan, salah satunya adalah dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

## **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Weyandt *et al.*, (2005) apabila suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada dalam kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dan akuntabel.

## **Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*) *electronic commerce*, dan yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akuntabel.

## **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, penerimaan nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2006). Sedangkan Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen merupakan loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya (Mowday *et al.*, 1979).

### **3. Metode Penelitian**

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 27 OPD di Kabupaten Bantul. Sedangkan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah kepala subbagian keuangan, akuntan (pembukuan), dan bendahara.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara) baik melalui observasi, wawancara, maupun pengisian kuesioner

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (*judgement*) tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Jogiyanto, 2017). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan serta pelaporan keuangan (bidang akuntansi dan perbendaharaan) pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Pegawai yang bekerja sebagai kepala subbagian keuangan, akuntan (pembukuan), dan bendahara di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Telah menjabat pada bagian tersebut minimal satu tahun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bantul. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang menggunakan instrumen berupa kuesioner. Adapun kriteria yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu kepala subbagian keuangan, akuntan dan bendahara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti selama bulan Juni tahun 2019, peneliti hanya menyebarkan 81 kuesioner kepada responden dan mengambil kuesioner tersebut satu minggu setelah waktu penyebaran. Data yang diolah oleh peneliti adalah sebanyak 77 kuesioner.

#### Uji Validitas

Dari hasil uji validitas seluruh item instrumen memiliki total nilai sig < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen untuk semua variabel valid.

#### Uji Reliabilitas

Dari hasil uji reliabilitas seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki reliabilitas yang tinggi.

#### Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 1 nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah 1,330 dan nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,240. Nilai tersebut >  $\alpha$  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari seluruh model penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

**TABEL 1**  
Uji Normalitas

Model Regresi	<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	<i>Asymp Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
1	1,330	0,058	Normal

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

##### b. Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinearitas seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dengan nilai VIF keseluruhan < 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

##### c. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji heteroskedastisitas setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai sig > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas pada analisis regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji koefisien determinan persamaan I menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinan (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,879 atau 87,9%. Hal ini menjelaskan bahwa variasi besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi dan variabel yang di moderasi pemanfaatan teknologi informasi\*komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah\*komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah\*komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia\*komitmen organisasi, sebesar 87,9%. Sedangkan sisanya 12,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

**TABEL 2**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	0,879

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

### Uji Signifikan Simultan (Uji Nilai F)

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji signifikan simultan menunjukkan besarnya nilai sig adalah 0,000. Nilai sig  $0,000 < \alpha 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel yang dimoderasi komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi\*komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah\*komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah\*komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia\*komitmen organisasi secara simultan memperkuat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**TABEL 3**  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F	Sig
1	62,444	0,000

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

### Uji Koefisien Regresi Berganda

$$\text{LKPD} = 1,326 + 0,92\text{SAP} + 0,125\text{SDM} + 0,130\text{SPI} + 0,112\text{TI} + 0,922\text{KO} + 0,002(\text{SAP}*\text{KO}) + 0,003(\text{SDM}*\text{KO}) + 0,004(\text{SPI}*\text{KO}) + 0,003(\text{TI}*\text{KO}) + e$$

### Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dengan perolehan nilai signifikansi 0,022 dengan arah koefisien positif sebesar 0,092. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu ( $H_1$ ) yang menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima.

Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga terjadi keefektifan didalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Amar (2005) menyatakan standar akuntansi pemerintah apabila diterapkan secara efektif, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karsana dan Suaryana

(2017) juga menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kompetensi sumber daya manusia merupakan sebuah hal yang dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai meliputi tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai signifikan 0,049 dengan arah positif sebesar 0,125. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua ( $H_2$ ) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeny (2016) karena dalam penelitiannya Yeny menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) juga menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Meskipun penelitian ini tidak mendukung dua penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini mendukung penelitian lain yang dilakukan oleh Karsana dan Suaryana (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan tidak selalu kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dapat menjadi jaminan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai perolehan signifikansi 0,026 dengan arah koefisien positif sebesar 0,130. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga ( $H_3$ ) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima.

Dengan hasil uji tersebut, maka penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silviana dan Zahara (2015) dan Yeny (2016) yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah memiliki arti bahwa semakin tinggi penerapan SPI, maka laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan andal.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai perolehan signifikansi 0,042 dengan arah koefisien positif sebesar 0,112. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat ( $H_4$ ) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah diterima.

Dengan hasil uji tersebut, maka penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nurillah dan Muid (2014), Firdaus *et al.*, (2015), dan Yeny (2016) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk mempermudah dan mempercepat dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai. Pada OPD Kabupaten Bantul proses akuntansi dari awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan telah dilakukan secara komputerisasi yang sudah terintegrasi dengan situs web Kabupaten Bantul.

### **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda pada variabel moderasi menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis lima ( $H_5$ ) yang menjelaskan bahwa variabel moderasi komitmen organisasi memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cornelia *et al.*, (2016) menyatakan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi dapat memperkuat penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah karena sumber daya manusia yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi lebih menjunjung budaya etis suatu organisasi sehingga semakin tinggi pula kecenderungan individu dalam berfikir dan berperilaku. Hal itu berdampak dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda pada variabel moderasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis enam ( $H_6$ ) yang menjelaskan bahwa variabel moderasi komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

Penelitian ini mendukung penelitian dari Stefani *et al.*, (2018) yang menyebutkan bahwa komitmen organisasi secara positif memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila sumber daya manusia yang berkompeten memiliki komitmen organisasi yang baik, maka pegawai tersebut akan merasa terikat dengan nilai-nilai organisasi sehingga apa yang dilukukannya akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi dengan mengerahkan segala kompetensi yang dimilikinya.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda pada variabel moderasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tujuh ( $H_7$ ) yang menjelaskan bahwa variabel moderasi komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Stefani *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif memoderasi sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam kenyataannya seorang pegawai yang mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan organisasinya maka tindakan dan kinerjanya akan sesuai dengan pengendalian intern. Yang mana sistem pengendalian intern ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi berganda pada variabel moderasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa



hipotesis delapan ( $H_8$ ) yang menjelaskan bahwa variabel moderasi komitmen organisasi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Stefani *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Pada kenyataannya seorang pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap tujuan organisasi maka ia akan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyusun laporan keuangan sehingga akan mempercepat kinerjanya.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan komitmen organisasi yang memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Daftar Rujukan

- Anggriawan, F. T., & Yudianto, I. (2018). Factors Affecting Information Quality of Local Government Financial Statement of West Bandung District, West Java Province, Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(1), 34.
- Cornelia, Yuniarta, Sujana, & Edy. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 22–35.
- Donaldson, & Davis. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Management*, 16.
- Firdaus, Nadirsyah, Fahlevi, & Heru. (2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 45–54.
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20), 38–47.
- Jogiyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE Yogyakarta.
- Karsana, I. W., & Suaryana, I. G. N. A. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 643–670.
- Lie, L. (2009). Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, XIV(2), 90–97.
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi* (Edisi Sepu). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mowday, Steers, W, L., & Porter. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Nurlis, & Yadiati, W. (2017). The Influence of Internal Control Effectiveness , Information

- Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8(12), 111–124.
- Putra, B. D., & Amar, S. (2005). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, (March), 25–27.
- Robbins, & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Business and Economics*, 20(1), 1–20.
- Silviana, & Zahara, G. (2015). The influence of Competence Local Government Agencies and The Implementation Government of Internal Control System toward the Quality of Local Government Financial Statement. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(11), 2222–2847.
- Stefani, Rura, Y., A, T., & Palimbong, M. (2018). the Effect of Competence of Human Resources and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Report With Internal Control System and Organizational Commitment As Moderation Variable. *International Journal of Advanced Research*, 6(12), 517–525.
- Suarnika, I. G. L., & Suputra, I. D. G. D. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten KarangAsem. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5.9, 2921–2950.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). *Fokus Bisnis*, 14(25), 26–44.
- Weygandt, J. ., David, Michael, & Toni, S. (2005). *Accounting principles*. New York: John Wiley & Sons.
- Wilkinson, John, W., Sons, & Locke. (2000). *Accounting Information System: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition*.
- Yeny. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal EMBA*, 4(3), 682–694.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–64.